

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, et al. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6.1 (2022): 974-980.
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361-384.
- Armada, B. (2024). Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 477-481.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Dewantoro, D. (2023). Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat dalam Menciptakan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022). *Jurnal Hukum Justitia*, 3(2), 110-126.
- Fikriana, A., & Rezki, M. K. (2024). Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu : Perspektif Fiqih Siyasah. *Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235-248.
- Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 14(2), 191-2023.
- Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). Siyasah Syarīyah & Fiqih Siyasah. Siyasah : *Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(11).
- Moho, H. (2019). Penegakkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1)
- Naylla, K. S., & Fakhrian, E. L. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

- Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 1523-1537.
- Quthny, A. Y. A., & Hariati, N. A. (2019). Implementasi masalah mursalah sebagai alternatif hukum islam dan solusi problematika umat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1-19.
- Rekaldo, R. (2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur) (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124-144.
- Rusfi, M. (2017). Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-Adalah*, 11(1), 63-74
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, 20-41.
- Salam, S., & Marlina, A. (2021). Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(1), 24-32.
- Satory, A., & Sibuea, H. P. (2020). Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil

- Sebagai Peraturan Perundang-Undangan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6(01), 1-27
- Shiddiq, A. (2022). Efektivitas Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Sutrisno, S., Puluhalawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168-187.
- Syarifah, D. A. (2023). Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Wafi, A. (2024). Fleksibilitas Hakim Dalam Penerapan Pasal 24 Ayat (3) Dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Pada Wilayah Kepulauan (Studi Di Wilayah Kabupaten Lingga). *Van Java Law Journal*, 1(01), 20-42.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.
- Yanuari, F. S. Y., & Prangsi, D. (2020). Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Padjajaran Law Review*, 8(2), 27-40.

Website

- Asep Nursobah. 2023. Inilah ketentuan panggilan melalui surat tercatat yang disebut ketua MA sebagai bentuk terobosan dan

- pembaruan hukum acara. Diakses pada 18-12-2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukumacara>
- Azizah. 2023. Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama. Diakses pada 04-01-2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama>
- Ikhbal Gusri. 2023. Optimalisasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dengan Mekanisme Pemanggilan Melalui Surat Tercatat. Diakses pada 24-12-2024, <https://pa-bukittinggi.go.id/optimalisasi-asas-cepat-sederhana-dan-biaya-ringan-dengan-mekanisme-pemanggilan-melalui-surat-tercatat/>
- Implementasikan Perma 7 2022, Pa Pasuruan Adakan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Pos Indonesia. Diakses pada 04-12-2024, <https://pa-pasuruan.go.id/implementasikan-perma-7-2022-pa-pasuruan-adakan-perjanjian-kerja-sama-dengan-pt-pos-indonesia/>
- Langkah-Langkah Reformasi yang dilakukan Mahkamah Agung. Diakses pada 19-12-2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5668/langkah-langkah-reformasi-yangdilakukan-mahkamah-agung>
- Rofiq Hidayat. Sepanjang 2023 MA menerbitkan 3 Perma dan Sema. Diakses pada 17-01-2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2023-ma-terbitkan-3-perma-dansema-lt658e7b1b3be74/?page=2>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Wawancara

Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri, Bapak Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.

Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, Ibu Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., M.H.I